



Bupati Bersyukur Sintang Raih Opini WTP

Syukur Saleh

Kasubbag Pemberitaan Setda Sintang

PEMKAB Sintang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar atas pengelolaan keuangan tahun 2012. Hasil pemeriksaan keuangan itu diterima Bupati Sintang, Drs Milton Crosby, dan Ketua DPRD Sintang, Harjono, dari Kepala BPK Perwakilan Kalbar, Adi Sudibyo, di Kantor BPK RI Perwakilan Kalbar di Jl Ayani Pontianak, Selasa (11/6).



OPINI WTP - Bupati Sintang, Milton Crosby (kiri) menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Kalbar, Selasa (11/6). Kabupaten Sintang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Adi Sudibyo menjelaskan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini merupakan raport dari pengelolaan keuangan daerah. Selama pemeriksaan, ada temuan pada sistem pengendalian dan ketidakpatuhan pada aturan. Namun, untuk Pemkab Sintang Adi memberikan opini WTP. "Jadi, hanya Kota Pontianak dan Kabupaten Sintang yang mendapat WTP,"

kata Adi Sudibyo. Ia menegaskan predikat WTP untuk Kabupaten Sintang bukanlah sebuah hadiah, melainkan hasil dari kerja keras Pemkab dan DPRD Sintang dalam mengelola dan mengawasi penggunaan keuangan negara. BPK Kalbar berharap Pemkab Sintang mampu mempertahankan predikat yang sangat baik dalam pengelolaan

keuangan negara tersebut, pada tahun-tahun berikutnya. Sebab biasanya mempertahankan predikat WTP, ini sulit. Terkait prestasi tersebut, Bupati Sintang, Milton Crosby, merasa bangga. Sebab, predikat WTP belum pernah diraih sebelumnya di Kabupaten Sintang. "Berkat pengawasan secara berkesinambungan, termasuk dengan dukungan

DPRD Kabupaten Sintang, kami akhirnya mampu meraih predikat WTP," kata Milton. Ia mengucapkan terimakasih kepada seluruh kepala dinas, badan, kantor, camat, dan lurah, yang telah bekerja keras. Menurutnya, pada 2006 lalu, Sintang mendapatkan disclaimer dari BPK. Pada 2007 sampai 2011, hanya mendapatkan Wajar dengan Pengecua-

lian (WDP). "Kami bersyukur pelaksanaan tahun anggaran 2012, bisa mendapatkan WTP," imbuh Bupati. Bupati Milton melihat ada lima faktor untuk mendapat nilai raport bagus dari BKP RI. Pertama, komitmen yang kuat dalam melaksanakan re-formasi birokrasi. Kedua, disiplin dan kerja keras SKPD. Ketiga, kekompakan, kebersamaan, serta kerjasama antara Pemkab Sintang dan DPRD. Keempat, dukungan dari masyarakat dan kelima bimbingan intensif dan konstruktif BPK dan BPKP. Ketua DPRD Sintang, Harjono, mengatakan keterlibatan pihaknya dalam pengawasan penggunaan keuangan negara tersebut karena bagian dari penyelenggaraan pemerintah di daerah sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Meski demikian, Milton mengaku lebih mengutamakan komunikasi agar penggunaan keuangan negara yang dilaksanakan aparat pemerintah, lebih tepat sasaran. (*/acu)